GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar	**:**	**Jurnal Nasional**	**Tgl/Bln/Thn**	**:**	**30 oktober 2007**
Subyek	**:**	**Bantaran Sungai**	**Hari**	**:**	**Selasa**
			Halaman	**:**	**06**

Penertiban Bantaran Sungai Mutlak Diperlukan

Banjir lima tahunan di Jakarta tidak akan teratasi tanpa penanganan yang komprehensif dan integral. Penanganan yang diperlukan meliputi kegiatan struktural, seperti pembangunan saluran air, polder, waduk, dan pompa, serta kegiatan yang terkait dengan perbaikan kondisi bantaran sungai, termasuk mengatasi permukiman di bantaran sungai.

Kepala Induk Pelaksana Kegiatan Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Departemen Pekerjaan Umum, Pitoyo Subandrio, di Jakarta kemarin (29/10) mengatakan penataan permukiman warga di sepanjang bantaran hingga badan Sungai Ciliwung mutlak diperlukan. Pasalnya, penataan sungai yang berhulu di wilayah Puncak, Jawa Barat itu menentukan berhasil tidaknya penanganan banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

“Penataan Ciliwung berperan sangat signifikan dalam penanganan ancaman banjir lima tahunan di DKI Jakarta,” ujar Pitoyo di sela-sela peluncuran produk badan penelitian dan pengembangan departemen PU, Senin (29/10).

Menurutnya, pemeliharaan Sungai Ciliwung sulit dilakukan karena sungai tersebut dikuasai masyarakat. Ia mencontohkan, Kali Krukut dan Kali Pesanggrahan yang tebing betonnya dipenuhi bangunan rumah. Terlebih, kesadaran masyarakat untuk memelihara sungai masih sangat rendah. Sungai makin menyempit dan mendangkal karena dijejali bangunan, sampah, dan sedimentasi.

Ia menambahkan, penanganan banjir di Jakarta tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan masalah teknis, seperti pengerukan sungai. “Masalah sosial menyangkut rendahnya kesadaran masyarakat juga perlu diatasi.”

Data departemen PU menyebutkan jumlah penduduk yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung mencapai 350 ribu jiwa, atau sekitar 71 ribu keluarga. “Bahkan ada warga di bantaran sungai yang memiliki sertifikat tanah,” ujarnya. Hal itu terjadi karena sebelumnya kawasan tersebut adalah tanah milik seseorang, namun kemudian dikeruk untuk tujuan pelebaran sungai. “Setelah sungai diperlebar, mereka kembali tinggal di kawasan itu karena masih menyimpan sertifikat tanahnya.”

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Penertiban wilayah bantaran sungai, lanjutnya, menjadi tugas pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, banjir tidak terhindarkan karena 13 sungai yang melintasi Jakarta tidak mampu menampung limpasan air hujan akibat sedimentasi. Belum lagi, kondisi geografis DKI Jakarta yang 40 persennya berada di bawah permukaan laut.

Diakuinya, penanganan ancaman banjir di Jakarta dan sekitarnya yang ditaksir akan menghabiskan biaya Rp9,5 triliun, masih terkendala keterbatasan dana. Alokasi dana dalam jumlah besar dari pemerintah baru akan dimulai tahun depan.

Masalah lainnya adalah terhambatnya pembangunan banjir kanal timur (BKT) akibat kesulitan pembebasan tanah di beberapa lokasi. Menurut Pitoyo, sulitnya pembebasan tanah menyebabkan pembangunan BKT tersendat.

Pembebasan tanah dibantaran sungai untuk penataan sungai diakuinya sangat melelahkan. Di samping belum ada kesadaran dari warga, mereka juga enggan direlokasikan ke rumah susun yang telah disediakan Pemda DKI.

Saat ini pihaknya berkutat pada penyelesaian penguatan tebing sungai sepanjang 3 kilometer, revitalisasi situ sebagai penampung sementara air hujan, dan penghijauan lahan kritis. Juga pembuatan parit di daerah hulu, rehabilitasi waduk Sunter dan pompa di Ancol dan Tomang.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP